

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1999, *UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*
- Anonim. 2001, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.*
- Anonim. 2001, *Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.*
- Anonim. 2004, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.*
- Anonim. 2012, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*
- Anonim. 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.*
- Hendra Muttaqin. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang*
- Moloeng, Lexy J. 2009. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. PT. Rajagrafindo, Bandung
- Maryanto, 2015. *Perlindungan Pelaku Usaha Kecil*, Pohon Cahaya Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan* 42
Alfabeta, Bandung :
- Sumanto, MA. 1995. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Andi Offset, Yogyakarta :
- Sutrisno Kosworo, Lilis Nuraida, 2013. *Efektivitas Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Kabupaten Cianjur.*

Tantri Widya. 2013. *Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Semarang Terhadap Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Dalam Kemasan (Amdk) Yang Sudah Terdaftar Ditinjau Dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Universitas Negari Semarang

Tio catur Sadewo. *Implementasi Pedoman Pemberian SPP-IRT oleh Dinas Kesehatan Kota Padang 2019*. Skripsi. Program S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Andalas Padang. di Padang

Fatma Nur Ardiati. *Evaluasi Pelaksanaan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Banyuwangi 2018* .Skripsi. Program S1 Kesehatan Masyarakat PSDKU UNAIR di Banyuwangi

Ratna Sari Yulianti. *Kajian Implementasi Persyaratan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Wilayah DKI Jakarta 2017*. Skripsi. Program S1 Teknologi Pertanian IPB di Bogor

Rezza Pradita A.. 2013. *Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Dalam Proses Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri*. Skripsi. Program S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Kediri

LAMPIRAN

H 4G 0K/s 9:00 AM



fatma nur ardian...



JPH RECODE Oktober 2018; 2 (1) : 36-51
<http://e-journal.unair.ac.id/JPHRECODE>

EVALUASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) DI BANYUWANGI

Fatma Nur Ardiati¹, Septa Indra Puspikawati²

¹Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi

²Departemen Gizi Kesehatan, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat PSDKU UNAIR di Banyuwangi

fatma.nur.ardiati-2015@fkm.unair.ac.id

ABSTRACT

The right to obtain safe and nutritious food is the same level as the right to be free from hunger. In order to maintain food safety, every food and beverage circulated must obtain a distribution permit in accordance with the provisions of the laws and regulation. This research aims to determine evaluation of SPP-IRT implementation in the food home industry in Banyuwangi with Indonesia National Agency of Drug and Food Control Number Hk.03.1.23.04.12.2205 of 2012 on guidelines for the provision of food production certificate of home industry. The type of this research is observational research based on Indonesia National Agency of Drug and Food Control Number Hk.03.1.23.04.12.2205 of 2012 on guidelines for the provision of food production certificate of home industry. There are four stages for SPP-IRT. In the third stage, the inspection of home industry food production facilities was observed in 15th food home industry in Banyuwangi along with District Food Inspector (DFI). This research was also carried out by indept interview with two DFI. The results showed that the implementation for SPP-IRT was good. First, acceptance of the application is appropriate. Second, Food safety elucidation is appropriate. Third, the inspection of production facilities is appropriate. Fourth, giving product number of home industry is appropriate. Overall, implementation of SPP-IRT in Banyuwangi already in accordance with Indonesia National Agency of Drug and Food Control Number Hk.03.1.23.04.12.2205 of 2012 on guidelines on the provision of food production certificate of home industry.

Keywords : SPP-IRT, IRT, Number of P-IRT, food safety

ABSTRAK

Hak untuk memperoleh pangan yang aman dan bergizi sama tingkatannya dengan hak untuk bebas dari kelaparan. Demi menjaga keamanan pangan, setiap makanan dan minuman yang diedarkan harus mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui evaluasi pelaksanaan SPP-IRT pada industri rumah tangga pangan di Banyuwangi dengan Perka BPOM RI Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional yang berpedoman pada Perka BPOM RI Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Ada 4 tahap dalam pemberian sertifikat produksi PIRT. Pada tahap ketiga yaitu pemeriksaan sarana produksi PIRT, dilakukan observasi pada 15 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Banyuwangi bersama dengan petugas pangan Dinas Kesehatan Banyuwangi. Penelitian ini juga dilakukan dengan indept interview kepada 2 orang petugas pengawas pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SPP-IRT di Banyuwangi sudah baik. Pertama, penerimaan pengajuan permohonan SPP-IRT di Banyuwangi sudah sesuai. Kedua, penyuluhan keamanan pangan sudah sesuai. Ketiga, pemeriksaan sarana produksi PIRT sudah sesuai; dan keempat, pemberian Nomor P-IRT sudah sesuai. Secara keseluruhan, pelaksanaan sertifikasi produksi pangan bagi industri rumah tangga di Banyuwangi sudah sesuai dengan Perka BPOM RI Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Kata Kunci: SPP-IRT, IRTP, Nomor P-IRT, keamanan pangan





ratna sari yuliant...



RATNA SARI YULIANTI. Kajian Implementasi Persyaratan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Wilayah DKI Jakarta. Dibimbing oleh SUKARNO dan ANITA NUR AINI.

Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, bahwa pangan olahan yang diproduksi IRTP wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Walikota/Bupati. IRTP yang ingin mendapatkan SPP-IRT harus mengikuti pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan di Dinas Kesehatan. Selanjutnya, IRTP harus menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sarana produksi IRTP yang dilakukan oleh tenaga DFI (*District Food Inspector*) yang ada di Dinas Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan penerapan CPPB-IRT juga mengetahui proses penerbitan SPP-IRT setelah tahun 2015 dan peran PTSP dan Dinas Kesehatan dalam penerbitan SPP-IRT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dan wawancara dengan menggunakan kuisioner. Data yang dihasilkan dari kuisioner diolah dengan Ms Excel dan dianalisis dengan SPSS 22 menggunakan analisis regresi linier berganda. Sejak Januari 2015, tahapan penerbitan SPP-IRT di Jakarta tidak hanya ditangani oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten melainkan ada suatu instansi yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan terdapat pembagian tugas antara PTSP dan Dinas Kesehatan terkait penerbitan SPP-IRT. PTSP bertugas dalam penerbitan izin dan Dinas Kesehatan bertugas dalam melakukan Penyuluhan Keamanan Pangan, pembinaan dan pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Implementasi penerbitan SPP-IRT di wilayah DKI Jakarta sudah mencapai 98%. Hasil pemeriksaan sarana produksi mengalami penurunan level dikarenakan IRTP yang tidak konsisten dalam menerapkan CPPB-IRT. Penurunan level IRTP ini menjadi hanya 5 IRTP (17%) level I, 3 IRTP (10%) level III dan 22 IRTP (73%) level IV. Tiga parameter ketidaksesuaian dengan temuan terbanyak yaitu parameter 26, 36 dan 37 yaitu 47%, 57% dan 53%. IRTP yang berhasil tetap konsisten terhadap penerapan CPPB-IRT hanya 5 IRTP. Faktor yang berhubungan dengan penerapan CPPB-IRT yaitu modal, cara distribusi dan pendidikan karyawan.

Kata kunci: CPPB-IRT, IRTP, SPP-IRT





ABSTRACT

REZZA PRADITA AFRISIAN, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2013, *Implementasi Peraturan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Dalam Proses Perizinan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri*, Lutfi Effendi SH.MHum; Agus Yulianto SH.MH.

In this paper the author discusses about the process of making the certificate in domestic food production industry in the field of licensing. This is motivated by the many foods that contain substances that should not be in food consumed by humans. So necessary to the protection of the consumer in order to continue to feel safe to consume foods purchased. Method approach is used socio-juridical, and the type used is the empirical research. Implementation in the field regarding the titling process of household food production industry is done in Kediri District Health Office. Results of this study are that it must be taken to obtain a certificate of household food production industry through a number of stages : *the application for SPP-IRT, food safety education, inspection equipment and production sites, and get a certificate of PP-IRT.*

Keyword : certificate in domestic food production

ABSTRAKSI

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membahas mengenai proses dalam pembuatan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga di bidang perizinan. Ini dilatarbelakangi dengan banyaknya makanan yang mengandung zat-zat yang seharusnya tidak berada dalam makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Sehingga diperlukan adanya perlindungan terhadap para konsumen tersebut agar tetap merasa aman untuk mengkonsumsi makanan yang dibeli. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, dan jenis yang digunakan adalah penelitian empiris. Pelaksanaan di lapangan mengenai proses pembuatan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini adalah bahwa hal yang harus ditempuh untuk mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga melalui beberapa tahap, yaitu *pengajuan permohonan SPP-IRT, penyuluhan keamanan pangan, pemeriksaan alat dan lokasi produksi, dan mendapatkan sertifikat PP-IRT.*

Kata Kunci : sertifikat SPP-IRT





IMPLEMENTASI PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA OLEH DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

Tio Catur Sadewo, mastoy (2019) *IMPLEMENTASI PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA OLEH DINAS KESEHATAN KOTA PADANG*. Diploma thesis, Universitas Andalas.



Text (COVER DAN ABSTRAK)
COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version
[Download \(333kB\)](#) | [Preview](#)



Text (BAB I)
BAB I.pdf - Published Version
[Download \(1MB\)](#) | [Preview](#)



Text (BAB VI)
BAB VI.pdf - Published Version
[Download \(112kB\)](#) | [Preview](#)



Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version
[Download \(153kB\)](#) | [Preview](#)



Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
[Download \(5MB\)](#)

Abstract

ABSTRAK Tio Catur Sadewo, No BP 1310842007, Implementasi Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga oleh Dinas Kesehatan Kota Padang, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2019. Dibimbing Oleh: Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA dan Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si. Skripsi Ini Terdiri Dari 148 Halaman Dengan Referensi 8 Buku Teori, 3 Buku Metode, 2 Skripsi, 1 Peraturan Republik Indonesia, 1 Peraturan Daerah, 1 Keputusan Walikota, dan 4 Website Internet. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses implementasi Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga oleh Dinas Kesehatan Kota Padang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya industri rumah tangga pangan (IRTP) yang belum memiliki sertifikat, namun masih bisa memasarkan produk pangan industri rumah tangga (PIRT). Tujuannya adalah untuk menjamin tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi Industri Rumah Tangga di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP. Dalam pelaksanaannya Dinas Kesehatan Kota Padang berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala dan masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi serta observasi. Untuk menguji keabsahan data yang didapat dilapangan maka dilakukan teknik triangulasi sumber. Peneliti menggunakan pendekatan model Mazmanian dan Sabatier. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa proses Implementasi Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga oleh Dinas Kesehatan Kota Padang belum berjalan dengan baik dibuktikan dengan masih banyaknya industri rumah tangga di Kota Padang yang belum memiliki sertifikat, sedangkan dalam peraturan disebutkan bahwa setiap industri rumah tangga pangan wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga tersebut. Industri rumah tangga yang tidak memiliki sertifikat dan masih bisa memasarkan produknya tersebut berkemungkinan dapat membahayakan konsumen dikarenakan belum lulus uji dari Dinas Kesehatan. Implementor sudah melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada kendala lain yang menyebabkan belum meratanya pemberian sertifikat kepada seluruh industri rumah tangga yang ada di Kota Padang. Kata Kunci : Implementasi, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Item Type: Thesis (Diploma)

Primary Supervisor: Rozidateno Putri Hanida, S.AP, M.PA

Subjects: [H Social Sciences > HN Social history and conditions, Social problems, Social reform](#)

Divisions: [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Negara](#)

Depositing User: s1 ilmu administrasi negara

Date Deposited: 23 May 2019 12:27

Last Modified: 23 May 2019 12:27

URI: <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/45255>

Actions (login required)



View Item



Dilema dalam penerapan Perka BPOM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat PIRT dalam pengawasan pangan pada masyarakat di kabupaten Karawang

<https://doi.org/10.22146/bkm.40608>

Yusrianti lie^(1*)

(1) Universitas Gadjah Mada

(*) Corresponding Author

H 4G 0,1K/s 10:58 AM

Abstract

Objektif: Dilatar belakangi dengan banyaknya peredaran produk pangan di masyarakat yang belum mempunyai sertifikat PIRT memungkinkan terjadinya penyebaran makanan yang mengandung zat-zat yang seharusnya tidak berada dalam makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam kebijakan Perka BPOM no 22 tahun 2018 di Lampiran II disebutkan untuk menerbitkan sertifikat PIRT ditentukan *hasil olahan dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari*. Dinas Kesehatan tidak bisa memberikan sertifikat PIRT kepada produsen dengan produk yang masa simpannya dibawah 7 hari yang ingin mendapatkan izin edar PIRT pada produknya, yang pada akhirnya Dinas Kesehatan kesulitan melakukan pengawasan keamanan pangan bagi masyarakat yang mengkonsumsi pangan yang tidak memiliki izin edar pangan. **Metode:** Kajian ini didukung dari data primer hasil wawancara dengan tenaga kesehatan di Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. **Hasil:** Implementasi izin edar produk makanan dan minuman industri rumah tangga secara umum menjadi tanggung jawab pihak Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sertifikasi PIRT tersebut merupakan bentuk legalisasi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan dan keamanan pangan kepada konsumen pangan industri rumah tangga (PIRT) agar terhindar dari bahan-bahan tambahan makanan yang berbahaya dan merugikan kesehatan sehingga diperlukan adanya pengawasan pangan yang beredar di masyarakat agar masyarakat

Keywords

Sertifikat PIRT; pengawasan pangan.

Full Text:

Berita Kedokteran Masyarakat ISSN 0215-1936 (PRINT), ISSN: 2614-8412 (ONLINE).



RECOMMENDED TOOLS



USER

Username:
Password:
☐ Remember me
[Login](#)

ABOUT THE AUTHOR

Yusrianti lie
Corresponding Author
Universitas Gadjah Mada
Indonesia

ARTICLE TOOLS



JOURNAL CONTENT

Search:

Search Scope: All

Search:

Browse:

- By Issue
- By Author
- By Title
- Other Journals

Selesai



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN**

Jl. Jamin Ginting Km. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos 20136
Telepon: 061-8368633 Fax: 061-8368644
email : kepk.poltekkesmedan@gmail.com



**PERSETUJUAN KEPK TENTANG
PELAKSANAAN PENELITIAN BIDANG KESEHATAN
Nomor: 01.719 /KEPK/POLTEKKES KEMENKES MEDAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian usulan penelitian yang berjudul:

"Studi Literatur Penerapan Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) Pada Beberapa Dinas Kesehatan Kabupaten Kota"

Yang menggunakan manusia dan hewan sebagai subjek penelitian dengan ketua Pelaksana/
Peneliti Utama : **Antonius Sitanggang**
Dari Institusi : **Jurusan D-III Farmasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan**

Dapat disetujui pelaksanaannya dengan syarat :

Tidak bertentangan dengan nilai – nilai kemanusiaan dan kode etik penelitian kesehatan

Melaporkan jika ada amandemen protokol penelitian.

Melaporkan penyimpangan/ pelanggaran terhadap protokol penelitian.

Melaporkan secara periodik perkembangan penelitian dan laporan akhir.

Melaporkan kejadian yang tidak diinginkan.

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa berlaku maksimal selama 1 (satu) tahun.

Medan, Agustus 2020
Komisi Etik Penelitian Kesehatan
Poltekkes Kemenkes Medan



Ketua,

Zuraidah Nasution
Dr.Ir. Zuraidah Nasution,M.Kes
NIP. 196101101989102001

Dipindai dengan CamScanner



Editor teks



Edit gambar



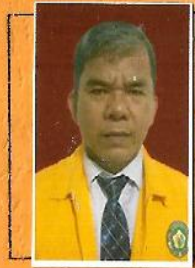
Isi Formulir



Anotasi



KARTU LAPORAN PERTEMUAN BIMBINGAN KTI
MAHASISWA RPL



Nama : ANITULUS BANGGANG
NIM : 20.1439019168
Pembimbing : RIMOSYAH APT. M.KES.

NO	TGL	PERTE MUAN	PEMBAHASAN	PARAF MAHASISWA	PARAF PEMBIMBING
1	29/1.20	I	Jurnal KTI.		
2	29/2.20	II	BAB I. (Pendahuluan).		
3	29/2.20	III	BAB II (Rumusan Masalah).		
4	29/2.20	IV	BAB III (Metodologi Penelitian).		
5	30/4.20	V	Pembahasan BAB I II III		
6	7/5.20	VI	Bimbingan BAB IV		
7	18/5.20	VII	Pembahasan BAB IV		
8	20/5.20	VIII	Bimbingan BAB IV		
9	22/5.20	VIII	Pembahasan BAB V		
10	2/6.20	IX	Pembahasan BAB IV, V		
11	12/6.20	X	Revisi BAB IV, V		
12	7/7.20	XI	ACC KTI		

Ketua,

Dra. Masniah, M.Kes., Apt
NIP. 196204281995032001